

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan negara dan daerah.

UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah, sehingga UU tersebut sering disebut dengan UU Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tersebut, maka perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah, termasuk dalam manajemen atau pengelolaan keuangan daerah, dapat diduga terjadi. Hal ini disebabkan karena manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah.

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintah pusat dan daerah (propinsi, kabupaten dan kota). Hal tersebut dinilai penting antara lain karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan manajemen dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Salah satu visi dan tujuan organisasi pemerintah adalah Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai tolak ukur kinerja, tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerahnya sehingga tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang terbentuk untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dana yang digunakan dalam organisasi ini adalah berasal dari dana publik, untuk itu pemerintah tidak hanya berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja tetapi juga kepada masyarakat luas, karena itu diperlukan sistem pengukuran kinerja untuk menilai

suatu strategi. Dalam pengukuran kinerja ini, sistem yang dipakai adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi mempunyai manfaat untuk membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, serta mengevaluasi kinerja. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi sangat berpengaruh bagi kualitas laporan keuangan dalam suatu dinas/perusahaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dapat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Atas dasar itu perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional sehingga dalam perumusannya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan daerah maka dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis.

Sebagai salah satu penyelenggara pemerintah daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya suatu sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk mengelolah dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, suatu sistem informasi akuntansi yang baik,

menjadi tolak ukur seberapa baik kualitas laporan keuangan yang ada pada sebuah entitas penyelenggara pemerintah.

Berdasarkan latar belakang dan kajian/penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyu dan Agung (2014); Fawzi (2011); Dan Anwar (2011) yang mengkaji pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT untuk mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT sehingga dapat memperbaiki Kualitas Laporan Keuangan.

2. Bagi Universitas

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terutama untuk memberikan masukan dan tambahan informasi serta menyampaikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi, mengenai masalah yang di hadapi yaitu tentang Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan

3. Bagi penelitian lanjutan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis maupun penelitian lanjutan, terutama penelitian lanjutan tentang pengaruh variabel lain terhadap Kualitas Laporan Keuangan atau pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap variabel lain.